

PERMUKIMAN BERBASIS PARIWISATA DAN TRANSFORMASINYA: REFLEKSI PASCA BENCANA DI JAWA BARAT BAGIAN SELATAN

Wiwik D Pratiwi⁽¹⁾ Samsirina⁽¹⁾ Hersanti Eko Ratnaningrum⁽²⁾ Robbi Zidna Ilman⁽²⁾ dan Nur Hamidah⁽²⁾

⁽¹⁾Kelompok Keilmuan Perumahan Permukiman, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, ITB

⁽²⁾Program Studi Arsitektur Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan; Institut Teknologi Bandung

Abstrak

Penelitian yang mendasari tulisan ini dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan pada permukiman pasca bencana, serta isu pendorong dan permasalahan perubahan tersebut. Bencana gempa dan tsunami telah mengubah lingkungan fisik maupun sosial di daerah lokasi studi yaitu Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Perubahan ini dapat bersifat menetap atau bersifat sementara, dengan macam serta tingkat perubahan yang berbeda di tiap komunitas. Perbedaan perubahan karena tidak samanya tingkat, jenis kerusakan dan kondisi serta sifat tempat yang bersangkutan. Terdapat tiga tingkatan karakteristik kerusakan yang terjadi akibat bencana dan menjadi dasar dalam pemilihan lokasi studi. Tiga desa menjadi lokasi studi pada penelitian ini yaitu (1) Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang (*low damage area*), (2) Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran (*medium damage area*), dan (3) Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih (*highly damage area*). Tulisan ini adalah hasil analisis penelitian transformasi permukiman pasca bencana di Pangandaran 2008. Hasil analisis menunjukkan faktor-faktor yang mendorong perubahan lingkungan permukiman di kawasan studi, yang dikategorikan dalam: (1) Faktor sosio-budaya, terkait pengendalian perkembangan serta pemeliharaan lingkungan permukiman. Rekomendasi kebijakan yang disarankan berupa perbaikan mekanisme yang sudah ada dan menjadikan mekanisme tersebut menjadi bagian dari komunitas. (2) Faktor politis-administratif, terkait pemberdayaan kelembagaan pembangunan dan pemeliharaan permukiman. Pengembangan pariwisata dengan pengembangan permukiman pasca bencana yang responsif terhadap kegiatan yang bisa dilaksanakan korban bencana (dengan ekonomi informal) merupakan kebijakan yang direkomendasikan.

Kata-kunci : pariwisata, pasca bencana, transformasi, perumahan, permukiman

Pendahuluan

Dengan besarnya kawasan pantai yang berpotensi bencana di Indonesia, penelitian tentang transformasi permukiman pasca bencana sangat penting dilakukan dan didokumentasikan dengan baik. Gempa bumi dan tsunami di tahun 2006 telah mengubah lingkungan fisik maupun sosial di Jawa Barat bagian Selatan. Karena bencana yang terjadi di sini dinilai tidak sebesar di Aceh dan Yogyakarta, maka perhatian publik dan akademisi untuk *recovery*-nya kurang. Perubahan yang terjadi karena bencana ini dapat bersifat menetap atau bersifat sementara, dan dengan macam serta

tingkat perubahan yang diperkirakan berbeda dari suatu komunitas ke komunitas lain.

Bencana yang melanda Jawa Barat bagian Selatan dan sejumlah permukiman lain di sepanjang Pantai Selatan Jawa Barat telah membawa pengaruh besar terhadap kondisi permukiman yang ada, baik yang terkena langsung maupun daerah yang selamat dari bencana. Pada daerah yang terkena langsung dampaknya berupa hancurnya bangunan, terhambat/terhentinya kegiatan penggerak kehidupan permukiman, salinasi dll. Sementara itu, mereka yang tidak terkena bencana pun dapat terpengaruh oleh perubahan lingkungan

sosio-ekonomi dan fisik yang terjadi seperti perubahan pada kondisi mata pencaharian akibat hilangnya konsumen, sumber bahan baku, rusaknya tempat usaha, atau bahkan justru dapat menarik sejumlah warga luar untuk tinggal dan melakukan kegiatan ekonomi di daerah ini sehingga terjadi pemadatan dll.

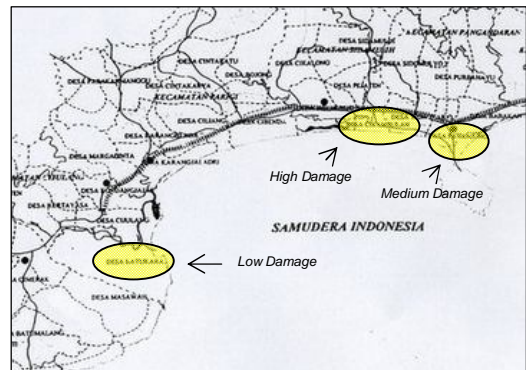
Setelah bencana terjadi aktivitas yang dilakukan adalah pemulihan lingkungan yang terkena dampak bencana tersebut. Aktivitas pemulihan dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait, inisiatif masyarakat sendiri, atau gabungan keduanya. Upaya pemulihan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan (transformasi) lingkungan fisik dan lingkungan alam dari sebelum bencana. Perbedaan bentuk transformasi dapat terjadi dikarenakan pelaku aktivitas pemulihan yang berbeda, tingkat kerusakan yang berbeda dan kondisi serta sifat tempat yang bersangkutan yang berbeda.

Perubahan yang dikaji terkait dengan perubahan pengelolaan lingkungan karena transformasi permukiman pasca bencana. Lebih khususnya pada perubahan pengelolaan lingkungan fisik dan non fisik yang terjadi. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan fisik dan non fisik pada permukiman pasca bencana, serta pendorong dan permasalahan perubahan tersebut. Dalam studi kasus ini dilakukan pengambilan data empiris di lapangan dengan menggunakan 90 (sembilan puluh) kuesioner dan wawancara. Berdasarkan analisis data empiris awal diketahui bahwa perubahan lingkungan perumahan terkait dengan perubahan kualitas lingkungan, pengendalian perkembangan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.

Perubahan Pengelolaan Lingkungan Permukiman Pasca Bencana

Penelitian di Pantai Selatan Jawa Barat ini memilih 3 (tiga) lokasi studi yaitu Desa Batukaras Kecamatan Cijulang, Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dan Desa Cikembulan Kecamatan Sidomulih. Ketiganya dipilih berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing. Desa Batukaras termasuk dalam kategori *low damage* karena tidak begitu parah terkena

bencana. Desa Pananjung adalah kawasan yang terkena bencana tetapi hanya lapisan luar saja dan dikategorikan wilayah dengan kerusakan *medium damage*. Dan Desa Cikembulan adalah kawasan yang paling parah terkena bencana sehingga tergolong *high damage*.



Gambar 1. Karakteristik wilayah studi kasus: *High, medium & low damage* di Jawa Barat bagian Selatan

Studi kasus mempunyai proses perubahan fisik dan non fisik yang berbeda-beda. Proses perubahan fisik pada kawasan studi kasus dapat dilihat dari:

1. Perubahan dan peralihan penggunaan tanah serta bangunan: dari hunian menjadi komersial
2. Jenis fasilitas sosial, fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun
3. Cara membangun: dari informal ke formal, melibatkan pihak pembangunan ketiga yang bukan pemilik tanah atau bangunan
4. Status kepemilikan tanah dan bangunan: dari menumpang atau milik pemerintah/desa/ pribadi ke milik atau hak guna pakai.

Sedangkan perubahan non fisik yang terjadi dalam bentuk: (1) Perubahan dalam jumlah dan tingkat kepadatan penduduk. (2) Perubahan kondisi sosio-ekonomi (3) Perubahan institusi membangun. Faktor-faktor pendorong perubahan di kawasan studi kasus dilihat dari: faktor sosio-budaya, faktor politis-administrasi, faktor ekonomi dan faktor fisik.

Berikut tabel yang meringkas hasil analisis data empiris yang dilakukan terkait perubahan permukiman akibat bencana.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Data Empiris (2008)

Analisis	<i>Low Damage</i>	<i>Medium Damage</i>	<i>High Damage</i>
Perubahan Kualitas Lingkungan	Perbedaan antar daerah studi kasus adalah pada tingkat keteraturan lingkungan perumahan, kondisi jalan, jenis bangunan hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial dan infrastruktur yang ada <ul style="list-style-type: none"> Sebelum: Hunian cenderung teratur, mengelompok dengan tanah kosong yang relatif luas. Terdapat perumahan sederhana milik warga yang berfungsi sebagai rumah sewa Sesudah: Indikasi transformasi permukiman yang terkait dengan fenomena bencana relatif kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum: Fisik bangunan teratur, menyebar dan lebih berciri perkotaan Sesudah: Teridentifikasi alih fungsi rumah menjadi penginapan, rumah makan dan toko 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum: Lingkungan perumahan tampak teratur dan mengelompok. Didominasi perumahan menengah ke bawah, dan beberapa bangunan mewah Sesudah: Teridentifikasi alih fungsi rumah menjadi tempat usaha. Perbaikan kualitas jalan dengan adanya bantuan dana pemerintah
Pengendalian Perkembangan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Teridentifikasi masyarakat yang sebelum bencana tidak memiliki tanah, menjadi memiliki tanah setelah tsunami sehingga terjadi pemadatan Pengendalian perubahan melalui sosialisasi persyaratan dalam membangun rumah atau pengurusan IMB 	Terdapat bantuan untuk perbaikan desa yang rusak akibat bencana senilai 10.000.000 rupiah yang dikelola oleh desa, pengerjaan dilakukan secara gotong royong warga	Pemadatan perumahan cukup terkendali. Selain karena kesadaran masyarakat yang cukup, kondisi ini juga didukung dengan adanya program desa berupa renovasi pelebaran jalan lingkungan. Masyarakat turut menyumbangkan tanahnya untuk jalan lingkungan
Pemeliharaan Lingkungan Perumahan	Sebelum dan sesudah: Pemeliharaan lingkungan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat di setiap dusun, dan lembaga masyarakat seperti Rukun Nelayan (RN), Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan kelompok lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum: pengelolaan dilakukan teratur dan terkoordinir oleh desa Setelah: Pengelolaan lingkungan dilakukan oleh individu 	Sebelum dan sesudah: Pemeliharaan lingkungan dilakukan secara bersama-sama antar warga desa dan pemerintah

Rekomendasi

Isu yang muncul dan dianggap penting dalam telaah mengenai transformasi permukiman pasca bencana yang telah dilakukan sebelumnya di antaranya adalah: (a) pembangunan infrastruktur sebagai pemandu kepada perkembangan yang teratur dan terencana, (b) penguatan kondisi dan hubungan sosio-ekonomi, dan perumahan sewa khususnya bagi masyarakat tidak mampu, (c) pemberdayaan komunitas setempat.

a) Pembangunan Infrastruktur wilayah

Infrastruktur perkotaan merupakan unsur strategis yang dapat memandu serta mengarahkan perkembangan dan pembangunan tempat. Bila jaringan jalan direncanakan dari awal oleh pemerintah dan rencana ini dapat sampai kepada masyarakat secara transparan maka perkembangan tempat diharapkan akan dapat lebih terpandu sehingga berimplikasi pada tingginya kualitas lingkungan permukiman dan lebih teraturnya perkembangan yang terjadi. Pada rencana jalan yang telah jelas, fisik jalannya itu sendiri dapat dibangun oleh berbagai aktor, bukan hanya oleh pemerintah

namun oleh komunitasnya itu sendiri dan peningkatan kualitasnya dapat dilakukan secara bertahap. Sementara itu, bangunannya sendiri dapat dibangun secara individu, komunitas, maupun oleh pengembang.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai segi positif dari peningkatan infrastruktur bagi kehidupan masyarakat itu sendiri sehingga kesadaran dan partisipasi mereka dapat meningkat.

Air bersih merupakan infrastruktur lain yang juga sangat penting. Di wilayah studi kasus nampak belum banyak warga yang menggunakan pelayanan PDAM. Hal ini selain karena faktor biaya, juga disebabkan oleh masih berlimpahnya kuantitas air bersih pada sumur-sumur individu mengingat lokasinya yang berdekatan dengan pantai. Namun demikian kualitas air bersih pada sumur-sumur tersebut yang dinilai rendah (mengandung karang) dan cenderung lebih rendah lagi setelah bencana, ini dapat menjadi indikasi akan pentingnya pelayanan PDAM yang memuaskan warga sehingga penggunaan air tanah lebih terkendali.

Hal serupa juga terjadi pada persampahan, saat ini memang masyarakat masih dapat membuang sampah rumah tangga mereka pada tanah-tanah kosong yang ada, yang bukan miliknya, dikarenakan jumlah tanah kosong tersebut yang masih berlimpah. Namun ke depannya, di saat jumlah tanah kosong semakin menurun seiring dengan makin pesatnya pembangunan, kebiasaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan tingginya masyarakat yang akan membuang sampah pada lokasi-lokasi yang tidak semestinya seperti pada sungai, pinggir jalan, dll. Oleh karenanya, perlu pengelolaan persampahan yang lebih baik dan terintegrasi di tingkat kota dan komunitas.

b) *Penguatan hubungan dan integrasi sosio-ekonomi, serta rumah sewa*

Warga tak mampu memerlukan kedekatan lokasi dengan warga mampu, dimana warga yang mampu berpotensi dapat memberikan peluang kerja, atau menjadi konsumen dari barang atau jasa yang dihasilkannya. Keberadaan masyarakat yang sifatnya heterogen dari segi sosio-ekonomi di berbagai kawasan, tidak segregatif, diperkirakan akan dapat memberikan sumbangan yang lebih positif terhadap peningkatan kualitas kehidupan perkotaan. Untuk itu, pemerintah kota dapat membantu warga miskin dengan pengadaan tanah dan bangunan sewa yang murah di lokasi yang bersangkutan. Kegiatan ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari pembentukan *land banking*.

c) *Pemberdayaan komunitas*

Salah satu tindakan atau kebijakan dalam mengatasi perubahan permukiman supaya lebih terkendali adalah dengan terlaksananya tugas dari seluruh bagian struktur organisasi desa sesuai dengan cakupan wilayahnya. Seperti untuk mengendalikan pembangunan perumahan di tingkat dusun dilakukan oleh kepala dusun.

Pendekatan partisipatif perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari "praktek sehari-hari" lembaga-lembaga pembangunan terkait. Disamping itu jejaring dan pembinaan secara berkala dari lembaga-lembaga pembangunan

terkait akan sangat bermanfaat dalam pemberdayaan dan peningkatan komunitas.

Terima kasih

Disampaikan kepada Institut Teknologi Bandung, yang telah membiayai penelitian bertema permukiman dan pasca-bencana yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman, Perancangan Arsitektur, dan Teknologi Bangunan dalam lingkup Program Studi Arsitektur ITB pada tahun 2008. Disampaikan pula kepada Tim Peneliti Transformasi Permukiman Pasca Bencana di Pangandaran di tahun 2008 H W Poerbo, M D Koerniawan, D Larasati, K Z Solihah, Syahyudesrina.

Daftar Pustaka

- KKPP-ITB. (2008) Pengelolaan Lingkungan dan Transformasi Permukiman Pasca Tsunami di Pangandaran. Laporan penelitian tidak dipublikasikan.
- Pratiwi, W.D., et.al (2008) Pengelolaan Lingkungan dan Transformasi Permukiman Pasca-Tsunami di Pantai Selatan Jawa Barat. Laporan penelitian tidak dipublikasikan.
- Pratiwi, W.D., et.al (2008) Penerapan Teknologi Untuk Rehabilitasi Permukiman Pasca-Bencana Dengan Pendekatan Bertumpu Masyarakat dipresentasikan pada Seminar Nasional Teknologi IV, Universitas Teknologi Yogyakarta, 5 April 2008: Penerapan Teknologi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat secara Berkelanjutan
- Pratiwi, W.D., (2007). Post-disaster settlement reconstruction and the regulative mechanism: A comparative enquiry. *Proceeding International Seminar on Post-Disaster Reconstruction* 8-10 Juli 2007.
- Pratiwi, W.D., and M Donny Koerniawan, (2007) Sustainability in housing and settlement: Diverse economic challenges for good architecture. Paper for The 8th SENVAR and 2nd Malay Architecture, 2007 Conference. 23-24 August 2007, Auditorium - Petra Christian University, Surabaya
- Pratiwi, W D., (2005) Land Development and Institutional Analysis, Working Paper in Housing and Settlement Research Group, Department of Architecture, ITB
- Pratiwi, W D., (1994) Development, Tourism, and Gender Analysis: Pangandaran, West Java, Indonesia as The Case Study, Unpublished Master Thesis, Faculty of Environmental Studies, York University
- UN HABITAT dan KKPP ITB (2006). *Transformasi Permukiman Pasca Tsunami di Aceh*, Laporan Penelitian